

Penyelesaian Batas Maritim Jadi Prioritas

YOGYAKARTA—Mantan Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Makarim Wibisono mengatakan, penyelesaian batas maritim tetap menjadi skala prioritas sebelum berbicara lebih jauh mengenai poros maritim.

“Kenyataannya memang kita masih punya persoalan perbatasan yang belum selesai sehingga harus diprioritaskan.”

MAKARIM WIBISONO

Mantan Duta Besar RI untuk PBB

“Kenyataannya memang kita masih punya persoalan perbatasan yang belum selesai sehingga harus diprioritaskan,” kata Makarim Wibisono dalam diskusi “Peluang dan Tantangan Indonesia Menuju Negara Maritim” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kemarin.

Menurut Makarim, masih belum berakhirnya penentuan batas maritim dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Australia, akan menjadi penghambat ketika pengembangan kekuatan poros maritim pada kemudian hari.

“Jangan sampai batas mari-

tim terus menerus menjadi penghambat dan rentan memunculkan ketegangan,” kata Makarim yang juga Pelapor Khusus PBB mengenai Situasi HAM Palestina.

Menurut Makarim, dengan batas maritim yang terdiri dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) serta landas kontinen yang jelas, praktik illegal fishing juga lebih optimal mampu dicegah.

Sementara pakar Geodesi Universitas Gadjah Mada (UGM), I Made Andi Arsana mengatakan, penetapan batas maritim diperlukan agar tidak terulang kembali peristiwa 7 April 2011. Dalam kejadian itu, petugas keamanan laut Malaysia dan Indonesia saling berdebat tentang batas laut.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI Salman Alfarisi mengatakan, masalah negosiasi batas maritim disikapi secara serius oleh Presiden Joko Widodo. “Presiden berkomitmen menyelesaikan negosiasi perbatasan yang tertunda ini,” kata dia.

Presiden, menurut dia, telah menunjuk utusan khusus sebagai mediator penyelesaian batas maritim sehingga perundingan beberapa negara yang bersinggungan batas dengan Indonesia, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Timor Leste, serta Palau, mulai dihidupkan kembali.